

**PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBANGUNAN  
DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik  
guna mencapai gelar Sarjana S.AP pada  
Program Studi Administrasi Publik*



Disusun Oleh,

**ERAN LOHO**  
**NIM. 2015-11-030**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBANGUNAN DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO

Identitas Penulis,

NAMA : ERAN LOHO

NIM : 2015-11-030

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK (S1)

Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal : 15 September 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**TUKIJAN, S.Sos,M.Si**  
NIDN. 1427016601

**DEFRAN SISKI,SE,MM**  
NIDN.1417098702

Mengetahui :

Ketua Program Studi

**GIRINIUS WENDA,S.Sos,M.Si**  
NIDN. 1412108801

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN PEMERINTAH DISTRIK DALAM PEMBANGUNAN  
DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO**

Telah dipertahankan skripsi ini di depan panitia ujian skripsi

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Ketua,

Sekretaris,

**TUKIJAN,S.Sos.,M.Si**  
NIDN. 1427016601

**DEFRAN SISKA,SE.,MM**  
NIDN. 1417098702

Anggota

Anggota

**H.AGUS SUMARYADI,S.Pt.M.Si**  
NIDN. 1212116701

**BAMBANG S.DOMI,S.Sos.,M.Si**  
NIDN. 1204076701

Mengetahui,

Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

**Dr.H.RUDIHARTONO ISMAIL,M.Pd**  
NIP.19700408 199702 1 002

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr.H.Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena
2. Bapak Tukijan,S.Sos M.Si dan Ibu Defran Siska, SE,MM selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran
3. Bapak H.Muhammad Ali,S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Bapak dan Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada program studi Administrasi Publik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi
5. Bapak Selodi Nekwek, S.Pd selaku Kepala Distrik Abenaho yang telah memberikan ijin, rekomendasi dan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Angkatan 2015/2016 atas kebersamaannya selama penulis duduk di bangku perkuliahan
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan rela membantu penulis baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, di mana masih jauh dari suatu karya ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga amal bhakti yang diberikan kepada penulis kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena, Agustus 2020

Penulis,

**ERAN LOHO**  
**NIM. 2015-11-035**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian peran.....	7
2. Pengertian Kepala Distrik.....	8
3. Indikator dalam pelaksanaan tugas pokok ....	
4. Kepala Distrik sebagai pelaksana pembangunan.....	9
5. Pengertian pembangunan.....	14
6. Pembangunan Daerah.....	16
7. Tujuan Pembangunan Daerah.....	17
8. Konsep distrik.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Definisi Operasional.....	20
D. Kerangka Konseptual Penelitian.....	21
<b>BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</b> .....	22
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
B. Jenis Penelitian.....	22
C. Populasi dan Sampel.....	22
D. Instrumen Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24

F. Teknik Analisa Data .....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. keadaan lokasi penelitian.....	36
2. keadaan responden .....	41
3. analisa data .....	43
B. Pembahasan .....	54
BAB V PENUTUP .....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAKSI

**ERAN LOHO, NIM. 2015 -11-035, *Peranan Pemerintah Distrik Dalam Pembangunan Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo*** (Pembimbing : Tukijan dan Defran Siska)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah distrik dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan variabel mandiri dengan indikatornya : mampu membuat perencanaan, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat, mampu mengambil keputusan, mampu mengkoordinir, dan mampu mengambil keputusan.

Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan *simple random sampling* ukuran sampel ditentukan menggunakan formula slovin sebanyak 78 orang. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor.

Berdasarkan hasil analisa data, menunjukkan hasil rata-rata nilai skor peranan pemerintah distrik diperoleh 127,25 yang berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah distrik Abenaho Kabupaten Yalimo kurang baik.

Indikator dengan skor tertinggi berasal dari indikator mampu mengkoordinir bawahan dan indikator mampu membuat perencanaan dengan skor terendah.

Kata kunci : *Peranan, Pemerintah Distrik*

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	kerangka Konseptual penelitian	29
Gambar 4.1	struktur organisasi distrik	43

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Surat Penelitian
Lampiran	2	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran	3	Data Hasil Penelitian
Lampiran	4	Gambar penelitian
Lampiran	5	Biodata penulis

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan organisasi pemerintahan kecamatan secara nasional dan khusus di Papua dengan penyebutan langsung kepada masyarakat adalah distrik. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia, maka distrik mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan (Unifa Rosidi, 2007).

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Distrik adalah perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa kampung/kelurahan (Sunindia dan Widayanti, 2008:63). Adapun yang menjadi aspek dalam pembangunan kecamatan terdiri dari beberapa bidang yaitu : bidang pemerintahan, desa dalam suatu wilayah kecamatan, ekonomi, sosial budaya, pembangunan masyarakat desa, keamanan dan ketertiban. Dalam berbagai bidang pembangunan di atas merupakan satu koordinasi dan tanggung jawab dari kecamatan.

Unifa Rosidi (2007) menyebutkan bahwa Kepala Distrik melaksanakan fungsi beragam jenis pelayanan kepada masyarakat ataupun melakukan pelayanan khusus pada suatu bidang. Salah satu tugas Kepala Distrik yang cukup penting sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa salah satu tugas Kepala Distrik adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup wilayah kerjanya.

Kepala Distrik mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program kerja distrik
2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis distrik
3. Penyelenggaraan tugas umum pemerintah
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja terkait

Dalam segala hal, Kepala Distrik perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat, ketelitian, keseriusan dan ketegasan dalam mengambil kebijakan agar setiap kebijakan pembangunan Distrik yang diambil terencana dan tepat sasaran. Dalam melakukan segala usaha guna tercapainya tujuan tersebut Kepala Distrik haruslah membuat atau membangun dukungan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi, dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan (Suharto, 2015:80)

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum distrik di Distrik Abenaho dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

No.	Tugas-tugas umum	Rencana kerja Distrik Abenaho
1	Pemberdayaan masyarakat	Menciptakan peluang-peluang ekonomi melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam suasana serta iklim kondusif

2	Ketentraman dan ketertiban	Menciptakan keamanan yang kondusif bagi masyarakat dengan koordinasi bersama aparat
3	Penyelenggaraan kegiatan pemerintah distrik dan Penyelenggaraan pemerintah kampung	Mengembangkan sistem pelayanan publik dan perencanaan pengembangan kampung yang maju dan terintegrasi dengan <i>stakeholders</i> yang ada serta pemberian pelatihan administrasi bagi Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung

Sumber data : Kantor Distrik Abenaho, 2019

Perencanaan pembangunan pada Tingkat Kecamatan tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 tahun 2009 Pasal 20 sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Distrik, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan
- 2) Perencanaan pembangunan Distrik merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya
- 3) Perencanaan pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui Musyawarah penyusunan rencana pembangunan Distrik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Menurut Kartono (2010:167) dalam melaksanakan pembangunan yang terencana dan terarah dengan baik, maka diperlukan perencanaan, pergerakan, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, tanpa adanya ini semuanya tidak akan dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Karena itu, perlu adanya seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut.

Pada hakikatnya tujuan pembangunan di suatu daerah itu bertujuan untuk :

- 1) Mengembangkan swadaya dan gotong-royong masyarakat agar mampu berperan secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan
- 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- 3) Melaksanakan upaya pembangunan secara mandiri yang didorong oleh peran aktif Kepala Distrik sebagai pelaksana pembangunan

Sejalan dengan proses percepatan, pertumbuhan, dan perkembangan pembangunan, untuk itu segenap komponen dan unsur pemerintah bertekad untuk membangun semua kekuatan dan potensi yang dimiliki khususnya fungsi Kepala Distrik sebagai pemimpin dan pelaksana pembangunan di distrik yang dipimpinnya.

Distrik Abenaho terdiri dari 5 kampung yaitu Kampung Sebi yang mempunyai jarak  $\pm$  3 km dari Distrik Abenaho, Kampung Wambak berjarak  $\pm$  6 km dari Distrik Abenaho, Kampung Dosumo  $\pm$  4 km, Kampung Humalma  $\pm$  7 km dan Kampung Lakongok berjarak  $\pm$  9 km (sumber data : Distrik Abenaho, 2019)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2019, terdapat beberapa program pembangunan yang telah direncanakan oleh Kepala Distrik untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten. Rencana program tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Rencana Program Pembangunan tahun 2019**

No.	Jenis pembangunan	Target	Terealisasi	Belum terealisasi
1	Perbaikan jalan dari Distrik Kampung-kampung	10 KM	3 km	7 km
2	Gedung sekolah	6 gedung	1 gedung	5 gedung
3	Penerangan	250 KK	50 KK	200 KK

Sumber data : Kantor Distrik Abenaho, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2018 direncanakan untuk perbaikan jalan sepanjang 100 km dari Distrik ke kampung-kampung yang ada di distrik, yang mana telah diperbaiki sepanjang  $\pm$  30 km. Pembangunan dan perbaikan gedung sekolah yang terdiri dari 4 gedung sekolah untuk Sekolah Dasar (SD) dan 2 gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah dibangun sebanyak 1 gedung Sekolah Dasar. Penambahan penerangan bagi masyarakat sebanyak 200 KK, yang mana baru terpenuhi sebanyak 50 KK.

Berdasarkan pengamatan peneliti, perencanaan telah dibuat baik oleh Kepala Distrik, namun belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini diduga kurangnya kemampuan Kepala Distrik dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana pembangunan, sehingga hasil dari pembangunan tidak sesuai seperti yang diharapkan, walaupun program pembangunan telah direncanakan.

Kepala distrik juga kurang menunjukkan kemampuannya untuk mengkoordinir bawahan dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa tidak diperlukan dalam proses pembangunan tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Elias Mabel yang mengatakan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik, kepala Distrik hanya melakukan musyawarah bersama beberapa anggota BMK saja, namun sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan apa saja yang akan dibuat kurang dilakukan (wawancara, 6 September 2019)

Kurang adanya pengarahan dan pengawasan dari Kepala Distrik menyebabkan program yang telah direncanakan kurang berjalan dengan baik. Kemampuan Kepala distrik kurang menggerakkan bawahannya dan masyarakat untuk ikut andil dalam pembangunan yang dilaksanakan. Ini disebabkan kehadiran Kepala Distrik yang jarang untuk mengawasi pembangunan yang dilaksanakan, sehingga pengerjaannya menjadi telat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “ **Peranan Pemerintah Distrik dalam Pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo**”

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini, penulis berusaha membatasi permasalahan yang akan dibahas agar memudahkan penulis untuk menganalisa lebih mendalam. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada variabel peranan Pemerintah Distrik dengan indikatornya : mampu membuat perencanaan, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat, mampu mengambil keputusan, mampu mengkoordinir, dan mampu mengambil keputusan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan Pemerintah Distrik dalam pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengukur peranan Pemerintah Distrik dalam pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian :

#### **a. Kegunaan teoritis**

Sebagai aplikasi dari teori-teori yang berkaitan dengan masalah pengembangan Administrasi Publik, khususnya peranan Pemerintah Distrik dalam pembangunan

#### **b. Kegunaan praktis**

Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Distrik dalam hal pembangunan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan arah dan langkah dalam pembangunan yang lebih lanjut, sehingga di masa yang akan datang pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo lebih berhasil mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian peran**

Secara etimologis, kata peran adalah pemain sandiwara, tukang lawak. Kata peran biasanya diberi akhiran an maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan, terutama atau karena hal atau peristiwa (Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012:733)

Peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Plano (2012:20) mengemukakan bahwa peranan atau *role* yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

Menurut Karl dan Rosenzweig (2011:13) konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dengan kegiatan dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.

Menurut Komaruddin (2010:94) yang dimaksud peran adalah :

- a) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
- b) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

## **2. Peranan Pemerintah**

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang strategis dan kedudukan yang strategis yang berkaitan dengan fungsinya selaku pelayanan public guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat. Sebab, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan di masa depan dalam hal ini berasal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan kativitas yang melibatkan berbagai elemen di dalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu.

Riyadi dan Bratakusumah (2004:8), dalam pengertiannya pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendisaian dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi misi, visi, sasaran dan tujuan yang diterapkan. Sedangkan Soemendar (Syafiee, 2011:8) bahwa pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya mesti memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.

Ndraha (1987:110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat

pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideology dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000:48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsinya yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan/dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki, yaitu : pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

### **3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Distrik**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Pemerintah Distrik mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;

- 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan /atau kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan
- 8) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga distrik;
- 9) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menanganai sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan.

**a. Kepala Distrik**

Menurut Suryaningrat (2008:29), Kepala Distrik adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Kepala Distrik juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala Distrik yaitu pengendalian pembangunan.

Di samping itu juga, Distrik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kepala Distrik dalam Bab IV menyebutkan bahwa :

- 1) Distrik dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah
- 2) Distrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin Kepala Distrik yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

- 3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Distrik juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :
  - a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kepala Distrik
  - f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau/kelurahan
  - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan
- 4) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atau usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Kepala Distrik dalam hal menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibantu oleh perangkat Kepala Distrik dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
- 6) Perangkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Kepala Distrik

- 7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau

Walikota dengan berpedoman pada Undang-undang

**b. Sekretariat**

Mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Distrik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pelayanan teknis administratif umum di lingkungan Distrik;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan penyusunan anggaran;
- 3) Penyusunan rencana kegiatan tahunan Distrik;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan dokumentasi serta informasi pembangunan;
- 5) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- 6) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan dan protokol;
- 7) Penyelenggara terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

Sekretariat , membawahi :

**a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, protokol dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta perjalanan dinas;
- 2) Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi;
- 3) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan rencana administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai di lingkungan Distrik;
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**b) Sub Bagian Keuangan.**

Mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Distrik , pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan keuangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja Distrik ;
- 2) Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan;
- 3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**c) Sub Bagian Program.**

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Distrik ;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat

(1) Pasal ini, Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan rencana dan program;

- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pembinaan organisasi dan tata laksana Distrik ;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**d) Seksi Tata Pemerintahan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan/atau Lurah, perangkat Kampung dan/atau Kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kampung dan/atau Kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
- 2) Pelaksanan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 4) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kampung dan/atau Kelurahan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kampung dan/atau Kelurahan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan/atau Lurah;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan/atau Kelurahan di tingkat Distrik;

- 9) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- 10) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung di wilayah kerjanya;
- 11) Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Kampung dan penyelesaian perselisihan antar Kampung;
- 12) Fasilitasi penataan Kampung/Kelurahan;
- 13) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung;
- 14) Penyelenggaraan lomba/penilaian Kampung/Kelurahan Tingkat Distrik;
- 15) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 16) Pemberian pertimbangan pengangkatan kepala Kelurahan;
- 17) Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 18) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di Kampung/Kelurahan dan Distrik, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pembinaan lembaga adat serta pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, kelompok organisasi dan pelayanan kesehatan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi :

- 1) Mobilisasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung/Kelurahan dan Distrik;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa/Kelurahan dan Distrik;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pemfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya;
- 5) Pelaksanaan pembinaan lembaga adat;
- 6) Penanggulangan masalah sosial;
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana;
- 8) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;
- 9) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

f) **Seksi Pelayanan Umum**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung atau Kelurahan serta melaksanakan koordinasi dengan SKPD, instansi

vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Distrik;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan/atau kelurahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal, dan swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 4) Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- 6) Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

**g) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama dan kepala suku yang berada di wilayah kerja Distrik untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Distrik;
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Distrik;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- 6) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

#### **4. Pemerintah Distrik sebagai pelaksana pembangunan**

Menurut Siagian (2010:159) dalam menjalankan peranannya sebagai aparatur pemerintahan, pemerintah Distrik harus berorientasi ke masa depan yaitu sebagai aparatur yang berdaya guna, berhasil guna, produktif, bersih, berwibawa, profesional, kreatif dan inovatif, transparan, peka dan tanggap, antisipatif, dan mempunyai visi dan misi. Aparatur pemerintahan adalah pelaksana roda pemerintahan dan menjalankannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Ndraha (2011:5) mengatakan bahwa fungsi pemerintah distrik sebagai pelaksana pembangunan adalah :

- a) Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan distrik

Perencanaan yang baik adalah apabila Kepala Distrik dalam membuat suatu perencanaan menentukan tujuan apa yang hendak dicapai dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan, selanjutnya Kepala Distrik hendaknya cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat dengan melibatkan elemen atau kelompok masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Menurut Manullang (2014:45) untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang mesti dilalui yaitu :

1. Menetapkan tugas dan tujuan
2. Mengobservasi dan menganalisis
3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
4. Membuat sintesi
5. Menyusun rencana

Sesuai pendapat di atas, Kepala Distrik harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan program pembangunan. Perencanaan yang baik apabila Kepala Distrik menentukan proses, program, strategi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam melaksanakan program pembangunan Kepala Distrik selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program pembangunan. Penggerakan atau motivasi adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis (Siagian, 2010:106)

Motivasi yang dilakukan oleh Kepala Distrik agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk sumbangan uang, benda,

tenaga dan pikirannya serta ide-ide cemerlang yang berguna bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan terus-menerus dan aktif dalam pembuatan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan umum (Yusran, 2017:11)

- b) Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan

Pengarahan merupakan pergerakan dan pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian sasaran. Merupakan penyatuan semua usaha dan penciptaan kerjasama, dalam memberikan pengarahan Kepala Distrik sebaiknya memiliki kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan masyarakat dan aparat untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.

Kemampuan memberikan pengarahan kepada bawahan atau masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Distrik harus memiliki kemampuan pergerakan dan mengendalikan masyarakat dan bawahan untuk selalu bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan.

- c) Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan

Untuk melaksanakan pembangunan Kepala Distrik harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan perencanaan program pembangunan.

Pengambilan keputusan adalah memilih suatu alternative dari dua pilihan atau lebih, dalam mengambil keputusan yang baik, pemerintah Distrik harus menanggapi keinginan masyarakat sehingga keputusan yang diambil benar-benar keputusan dan kebutuhan masyarakat, kemudian keputusan yang diambil haruslah

tegas dan konsisten dan bawahan merasa keputusan yang diambil memang alternative terbaik untuk masyarakat.

Siagian (2010:39) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, mencari alternative pemecahan, menganalisis setiap alternative sehingga ditemukan alternative yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil.

Sesuai dengan pendapat Sule (2014:116) keputusan yang tepat pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat rasional, sesuai dengan nurani dan didukung oleh fakta-fakta yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Distrik juga berperan dalam memberikan komunikasi yang jelas terhadap bawahan dan masyarakat agar mau bekerja sama, berperan serta berpartisipasi dalam pembangunan.

d) Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan

Mengkoordinir atau pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada dengan landasan konsepsi yang tepat, dan penentuan masing-masing fungsi (persyaratan tugas, tata kerja, tanggung jawab, dan antar relasi dari masing-masing fungsi), sehingga merupakan suatu totalitas sistem, di mana bagian yang satu menunjang dan bergantung (saling bergantung) pada bagian yang lainnya. Ringkasnya tugas pokok dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut :

1. Membagi tugas kerja
2. Membentuk kelompok-kelompok atau unit kerja

e) Mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Agar proses pembangunan berjalan dengan baik Kepala Distrik harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar kendala-kendala yang terjadi di lapangan bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti. Siagian (2010:317) mengatakan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan kontroling perlu dilaksanakan dalam pembangunan agar para pekerja dapat bekerja dengan baik ke arah pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan yang baik adalah apabila Kepala Distrik memonitor hasil pekerjaan dan segera melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut Kepala Distrik harus merencanakan terlebih dahulu dalam melaksanakan program pembangunan. Perencanaan yang baik apabila Kepala Distrik menentukan proses, program, strategi, dan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Siagian (2010 :106) dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah Distrik selaku penggerak dan pemberi motivasi terhadap masyarakat agar mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.

Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah Distrik harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat demi tercapainya tujuan pembangunan. Jangan sampai keputusan yang telah diputuskan bertentangan dengan program perencanaan pembangunan.

Siagian (2010:106) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data, yang relevan dengan masalah yang dihadapi, mencari alternative pemecahan, menganalisis setiap alternative sehingga ditemukan alternative yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat keputusan yang diambil.

## **5. Pengertian Pembangunan**

Pada hakikatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi Bratakusumah, 2010:31).

Menurut Rustiadi dkk (2011:23) pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternative yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistic. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Pembangunan lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

Menurut Siagian (2010:61) pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Kartasasmita (2012:27) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya (Alexander, dalam Siagian, 2010:61)

Menurut Sudiramunanwar (2012:15) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara

Menurut Tikson (2015:117) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan menurut Sukirno (2015:13) dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Menurut Mustopadijaja (2015:52) pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem pembangunan tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

Pembangunan diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap

warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Maksud dari manusiawi tersebut mengandung tiga (3) tema utama dalam pembangunan, yaitu :

- a) Koordinasi yang berimplikasi pada perlunya secara sah
- b) Terciptanya alternative yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada beragaman dalam seluruh aspek kehidupan
- c) Mencapai aspirasi yang paling manusiawi yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat (Nugroho dan Danuri, 2004:9)

Mencermati beberapa definisi pembangunan di atas dan sesuai dengan pemahaman penulis, maka yang dimaksud dengan pelaksana pembangunan dalam penelitian ini adalah seseorang dalam hal ini Kepala Distrik sebagai pelaksana pembangunan di Distrik yang dipimpinnya, harus mampu mengimplementasikan fungsinya dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan, serta mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien. Di samping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Distrik, merencanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakatnya juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang urgen dan strategis demi tercapainya program pembangunan di Kecamatan.

## **6. Pembangunan Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya-sumber daya

yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan daerah adalah seluruh aspek pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek hidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah :

- a) Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b) Dilaksanakan secara terpadu
- c) Meningkatkan swadaya masyarakat

#### **7. Tujuan Pembangunan Daerah**

Daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah.

Menurut Sudirwo (1981:64) tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui taha-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangkan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

#### **8. Bentuk Pembangunan Daerah**

Secara umum pembangunan dapat berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual.

Menurut Wresniwiro (2013:5) pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa infrastruktur bangunan fasilitas umum dan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat. Fisik merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti badan, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan, seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat.

Pembangunan fisik berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, penyuluhan tentang kesehatan, kewirausahaan, penyuluhan tentang hidup sehat dan lain-lain.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu disajikan pada matrik penelitian terdahulu sebagai berikut :

### **Matrik Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Referensi
1	Natalis Wanma	Peranan Kepala Distrik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala distrik dalam partisipasi masyarakat di bidang pembangunan berjalan sesuai dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari dana otonomi	<a href="https://onere search.id">https://onere search.id</a>

		di Distrik Biak Barat	khusus pemerintah. Peranan kepala distrik Biak barat dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan kampung	
2	Richy Suawah	Peran Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan peran Camat dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan sesuai hasil penelitian adalah cukup baik, di mana Camat mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari	Ejournal.uns rat.ac.id 2013
3	Rika Misiyanti	Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyerapan partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang sudah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan fisik, Camat selalu melibatkan diri dalam kegiatan perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan sudah dilakukan dengan aktif dan baik, Camat berkoordinasi membahas pembangunan fisik sudah dilakukan dengan baik dan menjalin hubungan	Ejournal.ip.f isip- unmul.ac.id 2014

			komunikasi yang harmonis melalui media musyawarah, rencana pemabngunan dan pengawasan yang dilakukan Camat dalam bentuk inspeksi langsung, observasi dan laporan secara lisan dan tertulis.	
--	--	--	---	--

### C. Definisi Operasional

Dari hasil kajian di atas yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu : Peranan Kepala Distrik dalam Pembangunan, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Peranan pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pembangunan ialah kemampuan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Distrik dalam melakukan perencanaan, pengambilan keputusan, pengarahan, koordinir dan pengawasan pada penyelenggaraan pembangunan yang diadakan di Distrik.

#### 1. Mampu membuat perencanaan

Mampu membuat perencanaan adalah kemampuan kepala distrik dalam membuat suatu rencana dalam penyelenggaraan pembangunan dengan menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengadakan kemungkinan-kemungkinan, membuat percobaan-percobaan, dan menyusun rencana

#### 2. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat

Mampu memberikan pengarahan adalah kemampuan kepala distrik dalam menyatukan, menggerakkan, mengendalikan, bekerja sama bersama bawahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan

#### 3. Mampu mengambil keputusan

Mampu mengambil keputusan adalah kemampuan Kepala Distrik dalam mengambil keputusan di antara pilihan-pilihan yang ada, tegas dan konsisten, dan mencari solusi dari permasalahan yang ada

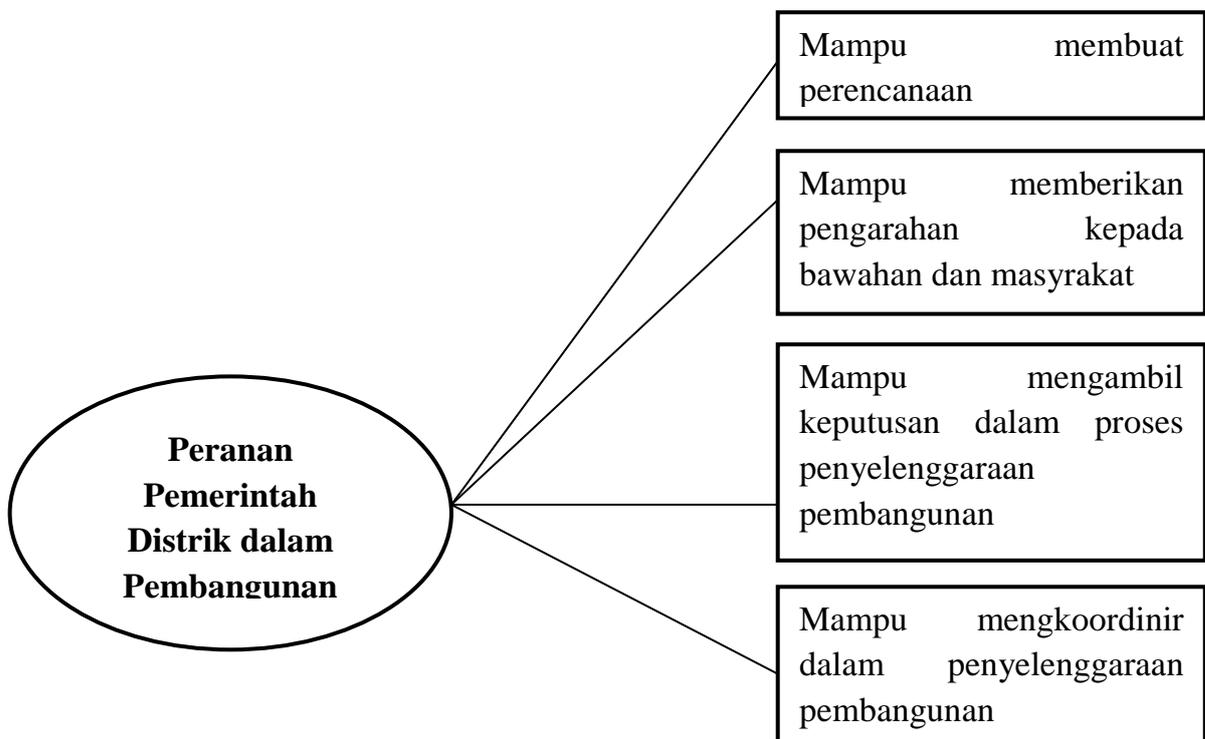
4. Mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat Pengarahan

Mampu mengkoordinir adalah kemampuan Kepala Distrik dalam membagi tugas kerja, bekerjasama antara bawahan dan masyarakat, membentuk kelompok-kelompok kerja, mengarahkan dan menggerakkan.

**D. Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian ini, maka kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual Penelitian**



Sumber data : Ndraha (2011:5)

Berdasarkan pada gambar 2.1 di atas, penulis menganalisa Peranan Kepala Distrik dalam Pelaksanaan Pembangunan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dengan indikatornya : mampu membuat perencanaan, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat, mampu mengambil keputusan, mampu mengkoordinir, dan mampu mengambil keputusan

## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi dalam penelitian adalah Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilakukan selama  $\pm$  2 bulan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut **Sugiyono (2008;11)**, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas alasan bahwa permasalahan yang diteliti yaitu peranan Kepala Distrik dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang perlu dibahas sebagaimana adanya.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut **Sugiyono (2008:90)**, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo yang terdiri dari 5 (lima) kampung yaitu Kampung Abenaho, Kampung Sebi, Kampung Jinggiwi, Kampung Dosumo dan Kampung Wambak yang mempunyai masyarakat sebanyak 347 KK (sumber data : Kantor Distrik Abenaho, 2019)

## 2. Sampel

Menurut **Sugiyono (2008:81)**, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2001:57) *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk menghitung besarnya sample digunakan formula slovin. Formula slovin digunakan dalam penentuan jumlah sample jika jumlah populasinya relative besar/banyak. Adapun formula slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan oleh peneliti (persentase kelonggaran ketidak telitian karena pengambilan sampel dari populasi = 5 %/10 % )

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)}$$

$$n = \frac{347}{1 + (347 (0,1)^2)}$$

$$n \approx 78$$

Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 KK dari Distrik Abenaho.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Menurut **Sugiyono (2008:118)**, mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diamati.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuesioner atau daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, di mana pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban melalui beberapa alternative saja, yaitu

- |                |        |
|----------------|--------|
| a. Sangat baik | skor 4 |
| b. Baik        | skor 3 |
| c. Cukup baik  | skor 2 |
| d. Tidak baik  | skor 1 |

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

##### **1. Penelitian pustaka**

Penelitian pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku, diktat bahan kuliah dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam pembahasan ini.

##### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan adalah melakukan pengamatan secara langsung pada tempat yang menjadi obyek penelitian, dengan cara sebagai berikut :

###### **a) Pengamatan (observasi)**

**Soetrisno** dalam **Sugiyono (2008:1660)**, mengemukakan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis atau dapat dikatakan

pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian. Dengan mengamati kondisi atau keadaan masyarakat di Distrik Abenaho

b) Angket (kuesioner)

Menurut **Sugiyono (2008:162)** kuesioner adalah teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar/membagi daftar pertanyaan yang telah disusun sedemikian rupa kepada responden atau masyarakat yang ada di Distrik Abenaho

c) Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik berupa buku-buku literature, diktat-diktat bahan kuliah, peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya yang memuat keterangan tentang masalah yang dibutuhkan dalam peranan kepala distrik dalam pembangunan

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa skor yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum.

$$\begin{aligned}\text{Nilai maksimum} &= 4 \times \text{jumlah responden} \\ &= 4 \times 78 \\ &= 312\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai minimum} &= 1 \times \text{jumlah responden} \\ &= 1 \times 78 \\ &= 78\end{aligned}$$

Berdasarkan nilai maksimum (312) dan nilai minimum (78), maka dapat dibuatkan interpretasi skor sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi Nilai Skor**

No.	Interval Skor	Predikat
1	$234 < \text{jumlah skor} \leq 312$	Sangat baik
2	$156 < \text{jumlah skor} \leq 234$	Baik
3	$78 < \text{jumlah skor} \leq 156$	Kurang baik
4	$1 < \text{jumlah skor} \leq 78$	Tidak baik



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Keadaan Lokasi Penelitian

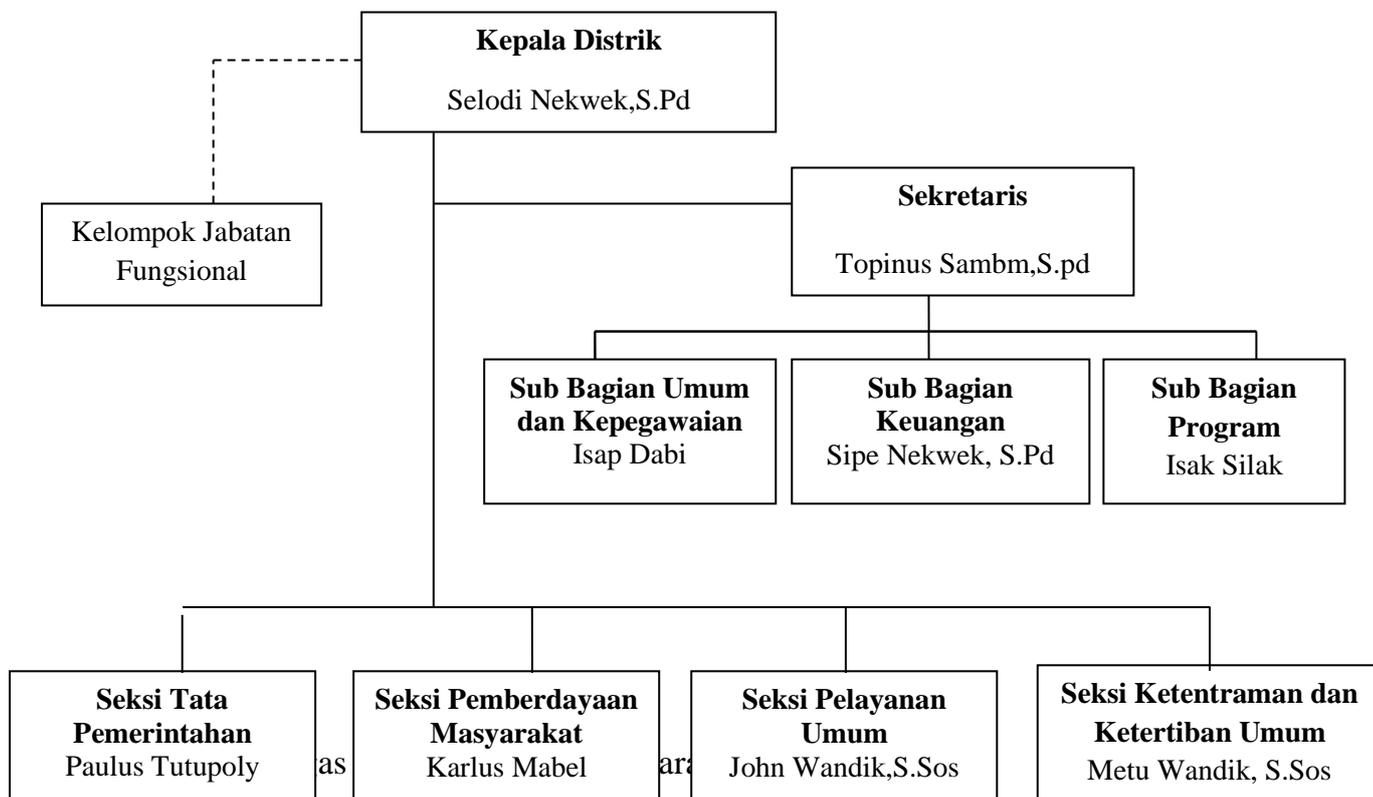
Distrik Abenaho merupakan salah satu distrik di Kabupaten Yalimo, yang terdiri dari lima (5) kampung yaitu :

- a) Kampung Sebi
- b) Kampung Jinggiwi
- c) Kampung Dosumo
- d) Kampung Wampak
- e) Kampung Lakongkok

Jumlah penduduk di Distrik Abenaho  $\pm$  347 KK (sumber data : Kantor Distrik Abenaho, 2020)

##### 2. Struktur organisasi distrik Abenaho

Struktur organisasi Distrik Abenaho disajikan pada gambar 4.1 sebagai berikut :



Tugas pokok dan fungsi Aparat Distrik Abenaho sebagai berikut :

1) Kepala Distrik

Kedudukan :

Kepala Distrik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah

Tugas pokok dan fungsi :

Kepala Distrik menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/ atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung/kelurahan
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan dan rumah tangga distrik
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan serta kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kepala Distrik mempunyai tugas pokok :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati

2) Sekretaris Distrik

Tugas pokok :

Memberikan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan distrik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan teknis administrative umum di lingkungan distrik
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan penyusunan anggaran
- c. Penyusunan rencana kegiatan tahunan distrik
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dokumentasi serta informasi pembangunan
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana
- f. Penyelenggaraan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan.

3) Sub bagian umum dan kepegawaian

Tugas pokok :

Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, protokol dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan surat-menyurat dan kearsipan serta perjalanan dinas

- b. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan dan inventarisasi
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan rencana administrasi kepegawain, kesejahteraan pegawai dan diklat pegawai di lingkungan distrik
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

#### 4) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok :

Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan anggaran pendapatan dan belanja distrik
- b. Pengelolaan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan keuangan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain atas petunjuk atasan

#### 5) Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok:

Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/ kelurahan, pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan/atau lurah, perangkat kampung dan/atau kelurahan, mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan/atau kelurahan.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik

- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahn kampung dan/atau kelurahan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung dan /atau kelurahan
- d. Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan/atau kelurahan

#### 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup distrik dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di kampung/kelurahan dan distrik, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pembinaan lembaga adat serta pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, kelompok organsasi dan pelayanan kesehatan.

#### 7) Seksi Pelayanan Umum

Tugas pokok :

Melaksanakan pelayanan umum yang menadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan serta melaksanakan koordinasi dengan SKPD, instansi vertikal dan swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di distrik
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung

### 3. Keadaan Responden

Keadaan responden pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

#### a. Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki – laki	38	48,72
2.	Perempuan	40	51,28
Jumlah		78	100,00

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas terlihat jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang (48,72 %) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 40 orang (51,28 %).

#### b. Keadaan responden berdasarkan usia

Keadaan responden berdasarkan usia terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2  
Keadaan responden berdasarkan usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	25 – 35	21	26,92

2.	36 – 45	26	33,33
3.	46 – 50	17	21,79
4.	51 – 60	11	14,10
5.	> 60	3	42,86
Jumlah		78	100,00

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas terlihat responden dengan usia 25 – 35 tahun sebanyak 21 orang (26,92 %), usia 36 -45 tahun sebanyak 26 orang (33,33 %), usia 46 – 50 tahun sebanyak 17 orang (21,79 %), usia 51 – 60 sebanyak 11 orang (14,10 %) dan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 3 orang (42,86 %).

c. Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3  
Keadaan responden berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sarjana (SI)	6	7,69
2.	Diploma	-	0
3.	SMU	24	30,76
4.	SMP	19	24,36
5.	SD	12	15,38
6.	Tidak bersekolah	17	21,79
Jumlah		78	100,00

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukkan responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (SI) sebanyak 6 orang (7,69 %), SMA sebanyak 24 orang (30,76 %), SMP sebanyak 19 orang (24,36 %), SD sebanyak 12 orang (15,38 %) dan tidak bersekolah sebanyak 17 orang (21,79 %).

### 3. Analisa Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dengan cara pengamatan dan pembagian kuesioner kepada responden.

Dengan variabel peran pemerintah dengan indikatornya : mampu membuat perencanaan, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dan masyarakat, mampu mengambil keputusan, mampu mengkoordinir, mampu mengambil keputusan dan mampu mengawasi aktivitas-aktivitas dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### a. Mampu membuat perencanaan

##### 1. Mampu menetapkan tugas dan tujuan

Tanggapan responden tentang mampu menetapkan tugas dan tujuan disajikan pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Tanggapan responden tentang mampu menetapkan tugas dan tujuan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	6	24
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	27	54
4.	tidak baik	1	42	42
Nilai			78	129

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas diperoleh skor sebesar 129 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan skor 24; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 27 orang dengan skor 54; tidak baik sebanyak 42 orang dengan skor 42.

2. Mampu mengobservasi dan menganalisis

Tanggapan responden tentang mampu mengobservasi dan menganalisis disajikan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5  
Tanggapan responden tentang mampu mengobservasi dan menganalisis

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	6	18
3.	Kurang baik	2	17	34
4.	tidak baik	1	52	52
Nilai			78	116

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.5 di atas diperoleh skor sebesar 116 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 6 orang dengan skor 18; kurang baik sebanyak 17 orang dengan skor 34; tidak baik sebanyak 52 orang dengan skor 52.

3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan

Tanggapan responden tentang mengadakan kemungkinan-kemungkinan disajikan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6  
Tanggapan responden tentang mengadakan kemungkinan-kemungkinan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	4	16
2.	Baik	3	3	9
3.	Kurang baik	2	12	24
4.	tidak baik	1	59	59

Nilai	78	108
-------	----	-----

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.6 di atas diperoleh skor sebesar 108 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan skor 16; baik sebanyak 3 orang dengan skor 9; kurang baik sebanyak 12 orang dengan skor 24; tidak baik sebanyak 59 orang dengan skor 59.

#### 4. Menyusun rencana

Tanggapan responden tentang menyusun rencana disajikan pada tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7  
Tanggapan responden tentang menyusun rencana

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	9	36
2.	Baik	3	4	12
3.	Kurang baik	2	19	38
4.	tidak baik	1	46	46
Nilai			78	132

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.7 di atas diperoleh skor sebesar 132 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 9 orang dengan skor 36; baik sebanyak 4 orang

dengan skor 12; kurang baik sebanyak 19 orang dengan skor 38; tidak baik sebanyak 46 orang dengan skor 46.

b. Mampu mengambil keputusan

1. Mampu memilih alternative lain

Tanggapan responden tentang mampu memilih alternative lain disajikan pada tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8

Tanggapan responden tentang mampu memilih alternative lain

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	2	8
2.	Baik	3	9	27
3.	Kurang baik	2	17	34
4.	tidak baik	1	50	50
Nilai			78	119

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.8 di atas diperoleh skor sebesar 119 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 2 orang dengan skor 8; baik sebanyak 9 orang dengan skor 27; kurang baik sebanyak 17 orang dengan skor 34; tidak baik sebanyak 50 orang dengan skor 50.

2. Tegas dan konsisten

Tanggapan responden tentang tegas dan konsisten disajikan pada tabel 4.9 berikut :

Tabel 4.9

Tanggapan responden tentang tegas dan konsisten

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	4	16
2.	Baik	3	10	30
3.	Kurang baik	2	18	36
4.	tidak baik	1	46	46

Nilai	78	128
-------	----	-----

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas diperoleh skor sebesar 128 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 4 orang dengan skor 16; baik sebanyak 10 orang dengan skor 30; kurang baik sebanyak 18 orang dengan skor 36; tidak baik sebanyak 46 orang dengan skor 46.

### 3. Mampu memecahkan masalah

Tanggapan responden tentang mampu memecahkan masalah disajikan pada tabel 4.10 berikut :

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang mampu memecahkan masalah

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	9	36
2.	Baik	3	2	6
3.	Kurang baik	2	13	26
4.	tidak baik	1	54	54
Nilai			78	122

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 10 di atas diperoleh skor sebesar 122 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 9 orang dengan skor 36; baik sebanyak 2 orang dengan skor 6; kurang baik sebanyak 13 orang dengan skor 26; tidak baik sebanyak 54 orang dengan skor 54.

### 4. Menganalisis setiap keputusan yang diambil

Tanggapan responden tentang menganalisis setiap keputusan yang diambil disajikan pada tabel 4.11 berikut :

Tabel 4.10

Tanggapan responden tentang mampu memecahkan masalah

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	9	36
2.	Baik	3	4	12
3.	Kurang baik	2	18	36
4.	tidak baik	1	47	47
Nilai			7	131

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 11 di atas diperoleh skor sebesar 131 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 9 orang dengan skor 36; baik sebanyak 4 orang dengan skor 12; kurang baik sebanyak 18 orang dengan skor 26; tidak baik sebanyak 47 orang dengan skor 47.

c. Mampu memberikan pengarahan

1. Mengendalikan dalam pelaksanaan program

Tanggapan responden berdasarkan mengendalikan dalam pelaksanaan program disajikan pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12

Tanggapan responden tentang mampu memecahkan masalah

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	11	33
3.	Kurang baik	2	21	42
4.	tidak baik	1	43	43
Nilai			78	130

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 12 di atas diperoleh skor sebesar 130 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 11 orang dengan skor 33; kurang baik sebanyak 21 orang dengan skor 42; tidak baik sebanyak 43 orang dengan skor 43.

2. Menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program

Tanggapan responden tentang menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program disajikan pada tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13

Tanggapan responden tentang menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	11	44
2.	Baik	3	8	24
3.	Kurang baik	2	15	30
4.	tidak baik	1	44	44
Nilai			78	142

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 13 di atas diperoleh skor sebesar 142 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 11 orang dengan skor 44; baik sebanyak 8 orang dengan skor 24; kurang baik sebanyak 15 orang dengan skor 30; tidak baik sebanyak 44 orang dengan skor 44.

3. Kerjasama dalam pelaksanaan program

Tanggapan responden tentang kerjasama dalam pelaksanaan program disajikan pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14  
Tanggapan responden tentang kerjasama dalam pelaksanaan program

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	7	28
2.	Baik	3	12	36
3.	Kurang baik	2	31	62
4.	tidak baik	1	28	28
Nilai			78	154

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 14 di atas diperoleh skor sebesar 154 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 7 orang dengan skor 28; baik sebanyak 12 orang dengan skor 36; kurang baik sebanyak 31 orang dengan skor 62; tidak baik sebanyak 28 orang dengan skor 28.

#### 4. Penyampaian informasi

Tanggapan responden tentang penyampaian informasi disajikan pada tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15  
Tanggapan responden tentang penyampaian informasi

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	12	48
2.	Baik	3	7	21
3.	Kurang baik	2	17	34
4.	tidak baik	1	42	42
Nilai			78	145

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 15 di atas diperoleh skor sebesar 145 yang berada pada predikat kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 12 orang dengan skor 48; baik sebanyak 7 orang dengan skor 21; kurang baik sebanyak 17 orang dengan skor 34; tidak baik sebanyak 42 dengan skor 42.

d. Mampu mengkoordinir masyarakat dan bawahan

1. Mampu membagi tugas kerja

Tanggapan responden tentang mampu membagi tugas kerja disajikan pada tabel 4.16 berikut :

Tabel 4.16  
Tanggapan responden tentang mampu membagi tugas kerja

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	3	12
2.	Baik	3	12	36
3.	Kurang baik	2	19	38
4.	tidak baik	1	44	44
Nilai			78	130

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4. 16 di atas diperoleh skor sebesar 130 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 3 orang dengan skor 12; baik sebanyak 12 orang dengan skor 36; kurang baik sebanyak 19 orang dengan skor 38; tidak baik sebanyak 44 dengan skor 44.

2. Mampu bekerja sama

Tanggapan responden tentang mampu bekerja sama disajikan pada tabel 4.17 berikut :

Tabel 4.17  
Tanggapan responden tentang mampu bekerja sama

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
-----	------------------	------	-----------	------------

1.	Sangat baik	4	16	64
2.	Baik	3	8	24
3.	Kurang baik	2	21	42
4.	tidak baik	1	33	33
Nilai			78	163

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.17 di atas diperoleh skor sebesar 163 yang berada pada predikat baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 16 orang dengan skor 64; baik sebanyak 8 orang dengan skor 24; kurang baik sebanyak 21 orang dengan skor 42; tidak baik sebanyak 33 dengan skor 33.

### 3. Membentuk kelompok-kelompok

Tanggapan responden tentang membentuk kelompok-kelompok disajikan pada tabel 4.18 berikut :

Tabel 4.18

Tanggapan responden tentang membentuk kelompok-kelompok disajikan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	17	68
2.	Baik	3	8	24
3.	Kurang baik	2	11	22
4.	tidak baik	1	42	42
Nilai			78	156

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.18 di atas diperoleh skor sebesar 156 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 17 orang dengan skor 68; baik sebanyak 8 orang dengan skor 24; kurang baik

sebanyak 11 orang dengan skor 22; tidak baik sebanyak 42 dengan skor 42.

4. Mengarahkan masyarakat dan bawahan

Tanggapan responden tentang mengarahkan masyarakat dan bawahan disajikan pada tabel 4.19 berikut :

Tabel 4.19  
Tanggapan responden tentang mengarahkan masyarakat dan bawahan

No.	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai skor
1.	Sangat baik	4	6	24
2.	Baik	3	9	27
3.	Kurang baik	2	17	34
4.	tidak baik	1	46	46
Nilai			78	131

Sumber data : diolah dari data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.19 di atas diperoleh skor sebesar 131 yang berada pada predikat kurang baik. Hasil ini diperoleh dari responden yang menjawab sangat baik sebanyak 6 orang dengan skor 24; baik sebanyak 9 orang dengan skor 27; kurang baik sebanyak 17 orang dengan skor 34; tidak baik sebanyak 46 dengan skor 46.

## B. Pembahasan

Untuk menunjukkan hasil penilaian dari analisis data, maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui hasil peran pemerintah distrik dalam pembangunan sebagai berikut :

1. Rata-rata skor indikator mampu membuat perencanaan

Rata-rata indikator mampu membuat perencanaan disajikan pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.20  
Rata-rata Indikator mampu membuat perencanaan

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Mampu menetapkan tugas dan tujuan	129	Kurang baik
2	Mampu mengobservasi dan menganalisis	116	Kurang baik
3	Mengadakan kemungkinan-kemungkinan	108	Kurang baik
4	Menyusun rencana	132	Kurang baik
Jumlah		485	
Rata-rata		121,25	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.20 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 121,25 berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa pemerintah distrik dalam membuat perencanaan kurang baik. Yang diperoleh dari sub indikator Mampu menetapkan tugas dan tujuan dengan skor 129; Mampu mengobservasi dan menganalisis dengan skor 116; Mengadakan kemungkinan-

kemungkinan dengan skor 108 dan Menyusun rencana dengan skor 132.

Hasil ini menunjukkan pemerintah distrik kurang baik dalam membuat perencanaan seperti menetapkan tugas-tugas bagi aparat distrik apa yang harus dilakukan demi pembangunan di distrik.

2. Rata-rata skor indikator mampu mengambil keputusan

Rata-rata indikator mampu mampu mengambil keputusan disajikan pada tabel 4.21 sebagai berikut :

Tabel 4.21  
Rata-rata Indikator mampu mengambil keputusan

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Mampu memilih alternative lain	119	Kurang baik
2	Tegas dan konsisten	128	Kurang baik
3	Mampu memecahkan masalah	122	Kurang baik
4	Menganalisis setiap keputusan yang diambil	131	Kurang baik
Jumlah		500	
Rata-rata		125	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.21 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 125 berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa pemerintah distrik kurang baik dalam mengambil keputusan.. Yang diperoleh dari sub indikator Mampu memilih alternative lain dengan skor 119; Tegas dan konsisten dengan skor 128; Mampu memecahkan masalah dengan skor 122; Menganalisis setiap keputusan yang diambil dengan skor 131.

Hasil ini menunjukkan pemerintah distrik kurang baik dalam mengambil keputusan, yang ditunjukkan oleh Kepala Distrik yang kurang mencari menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat, kurang tegas dan konsisten dalam membuat aturan-aturan di Distrik

3. Rata-rata skor indikator mampu memberikan pengarahan

Rata-rata indikator Mampu memberikan pengarahan disajikan pada tabel 4.22 sebagai berikut :

**Tabel 4.22**  
**Rata-rata Indikator Mampu memberikan pengarahan**

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Mengendalikan dalam pelaksanaan program	130	Kurang baik
2	Menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program	142	Kurang baik
3	Kerjasama dalam pelaksanaan program	154	Kurang baik
4	Penyampaian informasi	145	Kurang baik
Jumlah		571	
Rata-rata		142,75	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.22 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 142,75 berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa pemerintah distrik kurang baik dalam memberikan pengarahan. Yang diperoleh dari sub indikator Mengendalikan dalam pelaksanaan program dengan skor 130; Menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program

dengan skor 142; Kerjasama dalam pelaksanaan program dengan skor 154; dan Penyampaian informasi dengan skor 145.

Hasil ini menunjukkan pemerintah distrik kurang mampu dalam memberikan pengarahan. Yang ditunjukkan dari kurang mampu dalam menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan program-program yang ada distrik, seperti dalam membuat perencanaan, kurang mendengar saran-saran dari masyarakat.

4. Rata-rata skor indikator mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat

Rata-rata indikator mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat disajikan pada tabel 4.23 sebagai berikut :

**Tabel 4.23**  
**Rata-rata Indikator mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat**

No.	Sub Indikator	Nilai skor	Predikat
1	Mampu membagi tugas kerja	130	Kurang baik
2	Mampu bekerja sama	163	Baik
3	Membentuk kelompok-kelompok	156	Kurang baik
4	Mengarahkan masyarakat dan bawahan	131	Kurang baik
Jumlah		480	
Rata-rata		120	Kurang baik

Sumber data : olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.23 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 120 berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan pemerintah distrik kurang baik dalam mengkoordinir bawahan dan masyarakat. Yang diperoleh dari sub indikator Mampu membagi tugas

kerja dengan skor 130; Mampu bekerja sama dengan skor 163; Membentuk kelompok-kelompok dengan skor 156; dan Mengarahkan masyarakat dan bawahan dengan skor 131.

Hasil ini menunjukkan pemerintah distrik kurang baik dalam mengkoordinir bawahan dan masyarakat. Yang ditunjukkan dalam kurang mampu mengumpulkan masyarakat apabila ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kurang baik dalam mengatur bawahan di Kantor Distrik, yang ditunjukkan dari kantor distrik yang jarang buka.

#### 5. Hasil rata-rata variabel peranan pemerintah distrik

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas diperoleh hasil rata-rata variabel peranan pemerintah distrik dalam pembangunan disajikan pada tabel 4.24 di bawah ini :

Tabel 4.24  
Hasil Rata-rata variabel peranan pemerintah distrik

No.	Indikator	Skor	Predikat
1.	Mampu membuat perencanaan	121,25	Kurang baik
2.	Mampu mengambil keputusan	125	Kurang baik
3.	Mampu memberikan pengarahan	142,75	Kurang baik
4.	Mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat	120	Kurang baik
Jumlah		509	
Rata-rata		127,25	Kurang baik

Sumber data : hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.24 di atas, menunjukkan hasil rata-rata peranan pemerintah distrik diperoleh skor 127,25 yang berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah distrik Abenaho Kabupaten Yalimo kurang baik. Hasil ini diperoleh dari indikator Mampu membuat perencanaan

dengan skor 121,25; indikator Mampu mengambil keputusan dengan skor 125; indikator Mampu memberikan pengarahan dengan skor 142,75 dan indikator Mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat dengan skor 120.

Seluruh skor hasil penghitungan untuk semua indikator berada pada predikat kurang baik.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian milik Richy Suawah dengan judul penelitian Peran Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Camat dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan sesuai hasil penelitian adalah cukup baik, di mana Camat mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian , menunjukkan hasil rata-rata nilai skor peranan pemerintah distrik diperoleh 127,25 yang berada pada predikat kurang baik, yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah distrik Abenaho Kabupaten Yalimo kurang baik.

Hasil ini diperoleh dari indikator Mampu membuat perencanaan dengan skor 121,25; indikator Mampu mengambil keputusan dengan skor 125; indikator Mampu memberikan pengarahan dengan skor 142,75 dan indikator Mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat dengan skor 120.

Indikator dengan skor tertinggi berasal dari indikator mampu mengkoordinir bawahan dan indikator mampu membuat perencanaan dengan skor terendah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah distrik dapat melakukan studi banding ke distrik lain yang lebih maju agar dapat melihat program-program apa saja yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pembangunan di distrik
2. Hendaknya dalam mengambil keputusan melibatkan semua masyarakat dan bawahan
3. Dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat dengan sikap bijak dan tidak menggurui
4. Dapat mengatur masyarakat dan bawahan dengan membuat aturan-aturan yang mengikat

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Kartono, Kartini, 2010, *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Mandar Maju, Jakarta
- Kartasasmita, Ginanjar, 2012, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta
- Komaruddin, 2010, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara , Jakarta
- Kuswara, E, 2000, *Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokraso Lokal dalam Arus Bawah Demokrasi*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
- Manullang, 2014, *Dasar – dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press
- Natalis Wanma, *Peranan Kepala Distrik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan di Distrik Biak Barat*, <https://onereseach.id>, diunduh pada tanggal 4 September 2019
- Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*, Bumi Aksara, Jakarta
- Poerwadarminta, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Richy Suawah, *Peran Camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikala Kota Manado*, [Ejournal.unsrat.ac.id](http://Ejournal.unsrat.ac.id) 2013, diunduh pada tanggal 4 September 2019
- Rika Misiyanti, *Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, [Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id](http://Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id) 2014, diunduh pada tanggal 4 September 2019
- Rustiadi dkk, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan*, Gramedia Digital, Indonesia

Siagian, Sondang P, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

-----2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta

Sudiramunanwar, Haryono, 2002, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sule, Ernie Tisnawati, 2014, *pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta

Sukirno, Sadono, 2015, *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Kencana, Jakarta

Tikson, Deddy T, 2015, *Administrasi Pembangunan : Teori dan Praktek*, Digital Library UIN Sunan Gunung Jati, Bandung

Yusran, 2007, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat*, Andi Offset, Yogyakarta

## **B. Dokumen**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Lampiran : Kuesiner

## KUISIONER

### I. Petunjuk Pengisian

- Tuliskan identitas pada bagian yang telah disediakan di bawah ini
- Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai
- Jawablah semua dalam daftar pernyataan ini

### II. Identitas Responden

No. responden : .....

Jenis kelamin : .....

Usia : .....

Tingkat Pendidikan : .....

## KUISIONER PENELITIAN

No.	Daftar Pernyataan	Kategori Jawaban			
		SB	B	CB	TB
A. Mampu membuat perencanaan					
1.	Mampu menetapkan tugas dan tujuan				
2.	Mampu mengobservasi dan menganalisis				
3.	Mengadakan kemungkinan-kemungkinan				
4.	Menyusun rencana				
B. Mampu mengambil keputusan					
1.	Mampu memilih alternative lain				

2.	Tegas dan konsisten				
3.	Mampu memecahkan masalah				
4.	Menganalisis setiap keputusan yang diambil				
C. Mampu memberikan pengarahan					
1.	Mengendalikan dalam pelaksanaan program				
2.	Menggerakkan bawahan dan masyarakat dalam pelaksanaan program				
3.	Kerjasama dalam pelaksanaan program				
4.	Penyampaian informasi				
D. Mampu mengkoordinir bawahan dan masyarakat					
1	Mampu membagi tugas kerja				
2	Mampu bekerja sama				
3	Membentuk kelompok-kelompok				
4	Mengarahkan masyarakat dan bawahan				

Lampiran : Data Hasil Penelitian

Peranan pemerintah

No.	Mampu membuat perencanaan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2	√				√				√				√			
3	√				√				√				√			
4	√					√			√				√			
5	√					√				√			√			
6	√					√				√			√			
7		√				√				√			√			
8		√				√					√		√			
9		√				√					√		√			
10			√				√				√					√
11			√				√				√					√
12			√				√				√					√
13			√				√				√					√
14			√				√				√					√
15			√				√				√					√
16			√				√				√					√
17			√				√				√					√
18			√				√				√					√
19			√				√					√				√
20			√				√					√				√
21			√				√					√				√
22			√				√					√				√
23			√				√					√				√
24			√				√					√				√
25			√				√					√				√
26			√				√					√				√
27			√				√					√				√
28			√					√				√				√
29			√					√				√				√
30			√					√				√				√
31			√					√				√				√
32			√					√				√				√
33			√					√				√				√
34			√					√				√				√
35			√					√				√				√
36				√				√				√				√
37				√				√				√				√
38				√				√				√				√
39				√				√				√				√
40				√				√				√				√
41				√				√				√				√
42				√				√				√				√
43				√				√				√				√
44				√				√				√				√
45				√				√				√				√

46				√				√				√				√
47				√				√				√				√
48				√				√				√				√
49				√				√				√				√
50				√				√				√				√
51				√				√				√				√
52				√				√				√				√
53				√				√				√				√
54				√				√				√				√
55				√				√				√				√
56				√				√				√			√	
57				√				√				√			√	
58				√				√				√			√	
59				√				√				√			√	
60				√				√				√			√	
61				√				√				√			√	
62				√				√				√			√	
63				√				√				√			√	
64				√				√				√			√	
65				√				√				√			√	
66				√				√				√			√	
67				√				√				√			√	
68				√				√				√			√	
69				√				√				√			√	
70				√				√				√			√	
71				√				√				√			√	
72				√				√				√			√	
73				√				√				√			√	
74				√				√				√			√	
75				√				√				√			√	
76				√				√				√			√	
77				√				√				√			√	
78				√				√				√			√	
Jl	6	3	27	42	3	6	17	52	4	3	12	59	9	4	19	46

No.	Mampu mengambil keputusan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2		√				√			√				√			
3		√			√					√				√		
4	√				√				√				√			
5			√			√					√			√		
6		√				√			√				√			
7		√			√				√				√			
8			√				√				√			√		
9				√			√				√				√	
10		√				√			√				√			
11			√				√				√				√	
12				√			√				√				√	
13		√				√			√				√			
14				√			√				√				√	
15			√				√				√				√	
16		√				√			√				√			
17		√				√				√			√			
18			√				√				√				√	
19				√			√				√			√		
20				√			√				√				√	
21		√				√			√							√
22			√				√				√					√
23			√			√						√				√
24			√			√						√			√	
25			√				√					√				√
26				√			√				√				√	
27			√				√				√				√	
28				√			√					√				√
29				√			√					√				√
30			√				√					√			√	
31				√			√				√					√
32				√			√					√				√
33				√			√					√			√	
34				√			√					√				√
35				√			√					√				√
36				√			√					√			√	
37			√				√					√				√
38				√			√					√				√
39				√			√					√			√	
40				√			√					√			√	
41				√			√					√			√	
42				√			√					√				√
43				√			√					√			√	
44				√			√					√				√
45				√			√					√				√

46				√				√				√				√	
47				√				√				√					√
48				√			√					√					√
49				√				√				√			√		
50				√				√				√					√
51			√				√					√					√
52				√				√				√					√
53				√				√				√					√
54			√				√					√					√
55				√				√				√					√
56				√				√				√					√
57				√				√				√					√
58			√					√				√					√
59			√				√					√					√
60				√				√				√					√
61				√				√				√					√
62			√				√					√					√
63				√				√				√					√
64								√				√					√
65				√				√				√					√
66				√				√				√					√
67				√				√				√					√
68				√				√				√					√
69				√				√				√					√
70				√				√				√					√
71				√				√				√					√
72				√				√				√					√
73				√				√				√					√
74				√				√				√					√
75				√				√				√					√
76				√				√				√					√
77				√				√				√					√
78				√				√				√					√
Jml	2	9	17	50	4	10	18	46	9	2	13	54	9	4	18	47	

No.	Mampu memberikan pengarahan															
	1				2				3				4			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	√				√				√				√			
2		√					√			√			√			
3	√				√				√					√		
4		√					√			√			√			
5		√					√								√	
6	√				√				√				√			
7			√				√							√		
8		√				√			√				√			
9				√			√								√	
10				√			√				√				√	
11			√				√									√
12		√			√					√			√			
13			√				√								√	
14			√				√				√					√
15		√				√					√		√			
16			√				√				√		√	√		
17			√				√				√					√
18		√			√						√		√			
19				√			√				√				√	
20			√				√				√				√	
21				√			√				√				√	
22		√			√						√		√			
23			√				√				√					√
24			√				√				√					√
25				√			√				√				√	
26				√			√				√				√	
27	√				√						√			√		
28			√			√					√			√		
29			√			√					√			√		
30		√			√						√					√
31				√			√				√					√
32			√			√					√			√		
33			√				√				√					√
34		√			√						√				√	
35				√		√					√				√	
36			√				√				√					√
37			√				√				√					√
38			√				√				√				√	
39			√				√				√				√	
40				√			√				√					√
41				√			√				√					√
42			√				√				√			√		
43				√			√				√					√
44			√				√				√					√
45			√				√				√					√
46				√			√				√				√	
47				√	√						√					√
48				√			√				√					√

49			√				√				√				√	
50				√			√				√				√	
51				√			√				√			√		
52				√	√		√				√			√		
53				√			√				√			√		
54				√			√				√			√		
55			√				√				√			√		
56				√		√					√			√		
57				√			√				√			√		
58				√			√				√			√		
59			√				√				√			√		
60				√			√				√			√		
61				√			√				√			√		
62				√			√				√			√		
63				√			√				√			√		
64				√			√				√			√		
65				√			√				√			√		
66				√			√				√			√		
67				√			√				√			√		
68				√			√				√			√		
69				√			√				√			√		
70				√			√				√			√		
71				√		√					√			√		
72				√			√				√			√		
73				√			√				√			√		
74				√			√				√			√		
75				√			√				√			√		
76				√			√				√			√		
77				√			√				√			√		
78				√			√				√			√		
Jl	3	11	21	43	11	8	15	44	4	3	12	59	9	4	19	46



49				√				√								√
50			√					√							√	
51				√				√							√	
52			√					√								√
53			√					√							√	
54				√				√								√
55			√					√								√
56				√				√							√	
57			√					√							√	
58			√					√								√
59				√				√								√
60			√					√							√	
61				√				√								√
62				√				√								√
63				√				√						√		
64				√				√								√
65				√				√								√
66				√				√							√	
67				√				√								√
68				√				√								√
69				√				√								√
70				√				√							√	
71				√				√							√	
72				√				√							√	
73				√				√								√
74				√				√								√
75				√				√								√
76				√				√								√
77				√				√								√
78				√				√								√
Jl	6	3	27	42	3	6	17	52	4	3	12	59	9	4	19	46

## **BIODATA PENULIS**

**ERAN LOHO** dilahirkan di Kampung Sumtamon pada tanggal 23 Desember 1995. Merupakan anak dari pasangan Ayah Yosia Loho dan Ibu Marlina Helakombo. Anak ke – 2 dari 5 bersaudara. Beragama Kristen Protestan.

Menamatkan pendidikan di SD YPK Pass Valey pada tahun 2006, SMP Negeri 1 Abenaho pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Abenaho pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena pada tahun 2015 yang telah berganti nama menjadi Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena pada tahun 2020.